

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Chomzah, Ali Achmad, 2002. *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I dan II*, Prestasi pustaka, Jakarta.
- _____, 2003. *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2015. *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hadi, Sutrisno, 2000. *Metodologi Research*, Universitas Gajah Mada, Jogjakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan.
- PT. Kereta Api (Persero), Tanah Kereta Api Suatu Tinjauan Historis, Hukum Agraria / Pertanahan dan Hukum Perbendaharaan Negara, (Semarang: Seksi Hukum PT. Kereta Api (Persero), 2000).
- Santoso, Urip, 2006, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.
- _____, 2002, *Hukum perjanjian*, Jakarta, Intermasa.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Perss).
- Sutedi, Adrian, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta,

B. Karya Tulis Ilmiah, Majalah, Artikel dan Jurnal:

- Chandra, Rizky Yulia, I.G.A Gangga Santi, Agung Basuki Prasetyo, *Kekuatan Hukum Grondkaart Milik PT KAI (Studi Penguasaan Tanah di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang)*, Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum Undip Semarang.

Hariyanti, Septi, *Penanganan Masalah Tanah Aset PT Kereta Api Persero Yang Dikuasai Masyarakat Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri*, Thesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Undip Semarang.

Santoso, Urip, *Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah*, (Jurnal Dinamika Hukum Vol 12 No. 1 Januari 2012).

C. Undang Undang dan Peraturan Lainnya:

Pemerintah Indonesia, 1958, *Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda*, Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia, 1960, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indoneisa, 1992, *Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang*, Lembaran RI Tahun 1992 No. 24. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indoneisa, 1953, *Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara*, Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indoneisa, 1996, *Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia, 1997, *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia, 2021, *Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah*, Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia, 1979, *Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat*, Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia, 1999, *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan*, Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia, 2013, *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak
Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah*, Jakarta: Sekretariat
Negara.